



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BUOL
NOMOR 108.04 / 116.17 / DPUPR / 2017

TENTANG
PROGRAM HIBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM PERDESAAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUOL
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung pencapaian program nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Buol perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam sebuah pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, Pemerintah telah menetapkan Program Pembangunan Nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 melalui layanan penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang layak pada tahun 2019;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buol tentang Pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK Nomor 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Lembaran Daerah Nomor 05.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM PERDESAAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Buol
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Buol
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten
5. Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pengembangan pelayanan air minum yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan Universal Acces Tahun 2019 bidang air minum dan sanitasi.
6. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
11. Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 (sepuluh) meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
12. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
13. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
14. Indikator Tujuan Pembangunan Milenium untuk ; peningkatan akses air minum adalah proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan perdesaan.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
16. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Pem'ediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 (enam puluh) liter per orang per hari.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
19. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
20. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
24. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
25. Pemantauan adalah kegiatan \mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

26. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

Pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten, serta dapat melalui integrasi Kabupaten ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 3

Dalam hal pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan dengan dana di luar APBD Kabupaten, maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Dinas/Badan yang membiayai Perencanaan Pembangunan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan berasal dari dana APBD dan sumber dana Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pihak penyandang dana.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan sebesar Rp.3.000.000.000,-. Dimana dana sebesar Rp.800.000.000,- sudah berada pada penetapan DPA Tahun Anggaran 2017 dan dana sebesar Rp.2.200.000.000,- dialokasikan pada penetapan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan wajib memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target Universal Acces dalam pencapaian sasaran akhir Tahun 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 7

- 1) Pemantauan pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan dilakukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- 2) Evaluasi pelaksanaan Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan menjadi bahan penyusunan kebijakan di tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- 4) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian /penyimpangan hasil, Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- 5) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melalui Tim Teknis menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 6) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis atas kinerja pembangunan sarana dan prasarana air minum perdesaan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 8

- 1) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buol melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis.
- 3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidak sesuaian / penyimpangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- 4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB IV
DOKUMEN
Pasal 9

Dokumen Program Hibah Pembangunan Sarana Air Minum Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 2 Mei 2017

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	u
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	h


BUPATI BUOL Ni
AMIRUDIN RAUF